

BAB III
PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID
TENTANG DEMOKRASI

A. Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholis Madjid dilahirkan di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 bertepatan dengan 26 Muharrom 1358 H. Nurcholis Madjid menghembuskan nafas terakhir dengan wajah damai setelah melafalkan nama Allah pada Senin 29 Agustus 2005 pukul 14.05 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta Selatan. Ia dibesarkan dari latar keluarga pesantren. Ayahnya bernama Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang yang didirikan dan dipimpin oleh pendiri Nahdlotul Ulama, *Hadiatus Syaikh* Hasyim Asy'ari. Karena itu, hubungan antara murid dan sang guru ini kemudian semakin erat barang kali karena beberapa alasan. *Pertama*, kiai Madjid merupakan santri kinasih Hasyim Asy'ari, tokoh karismatik yang memelopori lahirnya NU.¹ *Kedua*, Abdul Madjid sendiri pernah dinikahkan dengan Halimah, seorang wanita keponakan gurunya. Tentang hal ini, Cak Nur sendiri pernah mengisahkannya, “waktu itu kyai Hasyim Asy'ari sendiri yang menginginkan ayah menjadi mantunya”.² Tapi demikian diungkapkan Cak Nur, pernikahan tersebut tidak membuahkan keturunan. Karena alasan inilah mereka kemudian ‘berpisah’ secara baik-baik. Hasyim Asy'ari

¹ Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung : Zaman Wana Mulia, 1998, hlm.121-122.

² Wawancara Dedy Djamiluddin Malik dengan Nurcholis Madjid di Bandung, pada Desember 1989, dimuat dalam buku Djamiluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Ibid.* hlm. 123.

menganjurkan ayah untuk menikah dengan ibu saya sekarang. Demikian Cak Nur menuturkan hingga ayahnya berkenalan dengan ibunya. Ibu Cak Nur sendiri adalah putri kiai Abdullah Sadjad dari Kediri, yang juga teman baik kiai Hasyim Asy'ari.

Sketsa singkat latar belakang keluarga Cak Nur di atas cukuplah untuk menunjukkan bahwa ia terlahir dari sub kultur pesantren.³ Di kawasan Jawa yang menurut Geertz menyimpan ketegangan simbolik antara berbagai kekuatan, Cak Nur tumbuh sebagai pribadi dan meresapi masa kecilnya. Tak heran dalam menghirup ketegangan kultural antara penghayatan seorang anak manusia dengan perubahan yang menyertai dinamika masyarakat Jawa saat itu, sedikit banyak juga ikut mempengaruhi visi Cak Nur di kemudian hari. Melewati masa mudanya, Cak Nur misalnya, merupakan salah seorang yang menjadi saksi dari berbagai ketegangan kultural yang mewarnai Jombang kala itu. Seperti kita tahu, Jombang secara geografis berada di daerah jantung Islam Jawa. Sebagai jantung Islam, ia menyerap dan menyalurkan berbagai gejala masyarakat tempat Cak Nur melewati masa kecilnya.

Cak Nur sendiri pernah mengungkapkan kegiatannya kala itu, “yang menjadi sumber kebencian saya terhadap komunitas lain”, demikian ujar Cak Nur dalam suatu kesempatan kepada *Editor*, Abanganisme zaman itu, menurut pengakuannya adalah PKI dan PNI Merah, yang siap menggilas anak-anak

³ Sebuah Sub Kultur minimal harus memiliki keunikannya sendiri dalam aspek-aspek berikut : Cara hidup yang dianut, Pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti, Serta hirarki kekuasaan intern tersendiri yang ditaati sepenuhnya. Ketiga persyaratan minimal ini terdapat dalam kehidupan pesantren, sehingga dirasa cukup untuk mengenakan predikat sub kultur pada kehidupan itu. Lihat Abdurrohman wahid, “pesantren sebagai subkultur”, dalam M. Dawam Raharjo (ed.), *Pesantren dan pembaharuan*, Jakarta : LP3ES, 1998, hlm. 43.

santri. Sebagai anak yang dibesarkan dalam tradisi pesantren dengan muatan kultural Jawa, perlahan Cak Nur kecil tumbuh menjadi seorang pribadi. Ia mereguk pemahaman agama dari dunia tempat agama tidak hanya diterima sebagai bagian ritualisme tetapi juga ketika keberagamaan begitu dipengaruhi oleh kultur lokal. Menurut pengakuan Cak Nur, ia pertama kali belajar agama lewat ayah dan ibunya sendiri. Kebetulan merek berdua memang mendirikan madrasah sendiri pada tahun 1948 dan Cak Nur adalah salah seorang murid di madrasah tersebut. Selain itu, Cak Nur kecil yang mengikuti Sekolah Rakyat (SR) di kampungnya.

Selanjutnya, setamat Sekolah Rakyat, 1952, ia dimasukkan oleh ayahnya ke pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Namun, di Darul Ulum Cak Nur hanya bertahan hanya dua tahun. Ada dua alasan, yang menurut Cak Nur, mengapa ia hanya bertahan dua tahun “nyantri” di sana. *Pertama*, karena alasan kesehatan dan *kedua*, karena alasan ideologi atau politik.

Namun alasan politiklah yang agaknya cukup menarik sikap Cak Nur tersebut. Seperti kita tahu, pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan sejak itu NU berubah peran dari *jam'iyah* keagamaan menjadi partai politik. Ayah Cak Nur sendiri bersamaan aktif di organisasi tradisional keagamaan NU dan partai politik di bawah modernisme Islam, Masyumi. Ketika NU berpisah secara politis dengan Masyumi tahun 1952, ayahnya tetap memilih

Masyumi, dan akhirnya mengirimkan anaknya dari pesantren tradisional ke pesantren modern yang masyhur, yaitu Gontor.⁴

Saat itu, ayah Cak Nur, yang kebetulan aktivis berat Masyumi merasa 'kecewa' pada NU, ketika organisasi itu keluar dari Masyumi dan membentuk partai politiknya sendiri. Karena olah sang ayah inilah, santri kecil Cak Nur sering diledek teman-temannya yang NU sebagai 'anak Masyumi kesasar'.⁵

Mengingat masa itu, Cak Nur pernah menuturkan, "ayah sendiri dimusuhi oleh para kiai di Jombang. Karena situasi seperti ini, lalu saya minta agar ayah pindah saja ke NU". Namun usul putranya ini ditolak oleh sang ayah dengan alasan, yang bisa berpolitik itu Masyumi, bukan NU. Demikian Cak Nur mengenang. Lagi pula, demikian Cak Nur sambil menyitir kata-kata yang pernah diucapkan sang ayah, bahwa KH. Hasyim Asy'ari sendiri pernah berfatwa bahwa Masyumi merupakan satu-satunya wadah aspirasi bagi umat Islam Indonesia. Sayang memang, karena Hasyim Asy'ari sudah lebih dulu wafat pada 1948, sehingga tidak sempat menyaksikan NU yang kemudian berubah "baju" menjadi partai politik karena 'ketegangan' dengan Masyumi ada 1952.

Sikap tegas ayah Cak Nur yang tetap memlih jalur politik di Masyumi dan jalur ibadah di NU, membuat Cak Nur tak tahan untuk berlama-lama di Darul 'Ulum. Meskipun disana Cak Nur salah seorang murid yang berprestasi,

⁴ Lihat R. William Lidle, *Islam, Politik dan Modernisasi*, diberi pengantar oleh Taufiq Abdullah, Jakarta : Sinar Harapan, 1997, hlm. 13-14.

⁵ Seperti dituturkan sendiri oleh Nurcholish Madjid, "Begitu tamat SD, sesuai tradisi keluarga, saya dimasukkan ke pesantren Darul Ulum Jombang. Waktu itu NU cakar-cakaran dengan Masyumi (1955), saya masuk pesantren NU, sehingga jadi ejekan santri lain. "ini anak Masyumi kesasar", saya sedih sekali", Lihat Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan : Artikulasi dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta : Paramadina, 1998, hlm.161.

namun Cak Nur kecil tak mungkin lagi bisa betah di pesantren tersebut. Ia meminta agar ayahnya bisa memindahkan ke sekolah lain. Kemudian pada tahun 1955, Cak Nur dipindahkan ke pesantren Darusalam Gontor. Asumsi ayah, Gontor merupakan pesantren Masyumi. Rupanya di Gontor Cak Nur merasa lebih cocok. Dan menurut pengakuan Cak Nur, Gontor sendiri banyak memberi bekas kepadanya. Bagi Cak Nur, gontor inilah yang memberi inspirasi kepadanya mengenai modenisme dan non sektarianisme. Pluralisme disini cukup terjaga. Para santri boleh ke NU atau Muhammadiyah. Karena suasana seperti ini, Cak Nur merasa cocok belajar di Gontor. Dan di pesantren ini pula, Cak Nur sempat menunjukkan kembali bahwa ia seorang yang pantas diperhitungkan. Ia kembali menjadi salah seorang siswa terbaik dengan meraih juara kelas, sehingga dari kelas satu ia bisa loncat ke kelas 3 SMP.

Menurut kesimpulan Greg Barton⁶, seorang sarjana Australia yang pada 1995 melakukan penelitian tentang “Islam Liberal di Indonesia”, menyebutkan bahwa Gontor adalah unsur lain yang berpengaruh terhadap perkembangan intelektual Cak Nur. Ia berumur 16 tahun saat masuk Gontor dan selesai ketika berumur 21 tahun. Tepatnya pada tahun 1960, Nurcholish Madjid menyelesaikan studinya di Gontor dan untuk beberapa tahun ia mengajar di bekas almamaternya itu.⁷

⁶ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1999, hlm. 74-75.

⁷ Kurikulum Gontor di tempuh untuk jangka waktu enam tahun dengan tiga tahun yang terakhir mempelajari metode pengajaran. Maka sangat lazim alumni Gontor masih menetap di pesantren paling tidak untuk satu tahun lagi untuk mengajar. Adapun kelangsungan ekonomi para guru di pesantren ini sepenuhnya ditanggung oleh pesantren, bahwa guru-guru mendapat makan dan rumah pondokan, tidak lebih. Lihat Greg Barton, *ibid*, hlm. 75

Pendidikan di Gontor inilah yang menjadi andalan bagi kelanjutan belajar Nurcholish Madjid yang ditempuh sebelumnya dengan ayahnya, sehingga menghasilkan keluasaan wawasan yang menjadikan bekal saat pergi ke Jakarta pada tahun 1961 memiliki bakat akademik yang luar biasa, Nurcholish Madjid tanpa ragu dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi dan mencapai karir yang menjanjikan. Pada hal semasa kanak-kanak, ia berkeinginan menjadi seorang insinyur kereta api dan mendalami fisika serta matematika (*apa dan siapa 1985-1986*), sehingga elektronika merupakan salah satu hobinya. Dan dia juga berhasrat besar mengejar karir di bidang ilmu-ilmu terapan.⁸

Cak Nur mengakui bahwa selama di Gontor ia selalu meraih prestasi yang cukup baik. Dan kecerdasan Cak Nur ini rupanya di tangkap pula oleh pimpinan pesantren KH. Zarkasyi. Sehingga pada tahun 1960, ketika Cak Nur menamatkan belajarnya, sang guru bermaksud mengirim Cak Nur ke Universitas al-Azhar, Cairo. Tetapi karena di Mesir saat itu sedang terjadi krisis terusan Suez yang cukup kontroversial itu, keberangkatan Cak Nur sampai tertunda. Sambil menunggu keberangkatannya ke Mesir itulah Cak Nur memanfaatkan untuk mengajar di Gontor selama satu tahun. Namun waktu yang di tunggu-tunggu untuk berangkat ke Mesir ternyata tak kunjung tiba.

Kemudian Cak Nur melanjutkan studinya di IAIN Ciputat, ia diterima di fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam, dari sana Cak Nur mulai

⁸ *Ibid.*, hlm.74

menguncang pemikiran Islam di tanah air dan dari situ pula gebrakan pemikiran Islam memancar di langit intelektual Indonesia, Cak Nur dan kawan-kawanya menempati posisi unik dengan ide-ide pembaharuannya yang kontroversial di tahun 1970-an.

Politik praktis mulai dikenal Nurcholish saat menjadi mahasiswa. Ia terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat, tempat Nurcholish menimba ilmu di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pengalamannya bertambah saat menjadi salah satu calon Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Saat menjadi kandidat ketua umum, kemampuan Nurcholish sudah cukup lengkap, (pikirannya, ngajinya, menjadi imam, khotbah, ceramah agama)

Kendati memimpin organisasi mahasiswa ekstrakurikuler yang disegani pada awal zaman Orde Baru, Nurcholish tidak menonjol di lapangan sebagai demonstran. Bahkan namanya juga tidak berkibar di lingkungan politik sebagai pengurus Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), kumpulan mahasiswa yang dianggap berperan menumbangkan Presiden Sukarno dan mendudukkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai penggantinya. Prestasi Cak Nur lebih terukir di pentas pemikiran. Terutama pendapatnya tentang soal demokrasi, pluralisme, humanisme, dan keyakinannya untuk memandang modernisasi atau modernisme bukan sebagai Barat, modernisme bukan westernisme. Modernisme dilihat Cak Nur sebagai gejala global, seperti halnya demokrasi.

Pemikiran Nurcholish tersebar melalui berbagai tulisannya yang dimuat secara berkala di tabloid Mimbar Demokrasi, yang diterbitkan HMI. Gagasan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara ini memukau banyak orang, hingga Nurcholish digelari oleh orang-orang Masyumi sebagai “Natsir muda”. “Gelar Natsir muda itu bukan karena dia pintar agama, melainkan karena pemikiran-pemikirannya.

Pemikiran Nurcholish yang paling mengegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, adalah saat pemimpin umum majalah Mimbar Jakarta ini melontarkan pernyataan “Islam yes, partai Islam no”. Nurcholish ketika itu menganggap partai-partai Islam sudah menjadi “Tuhan” baru bagi orang-orang Islam. Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar. Bahkan, bagi kalangan NU, haram memilih Partai Masyumi. Padahal orang Islam tersebar di mana-mana, termasuk di partai milik penguasa Orde Baru, Golkar. Pada waktu itu sedang tumbuh obsesi persatuan Islam. Kalau tidak bersatu, Islam menjadi lemah. Cak Nur menawarkan tradisi baru bahwa dalam semangat demokrasi tidak harus bersatu dalam organisasi karena keyakinan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu kebangsaan.

Karena gagasannya ini, tuduhan negatif datang ke arah Nurcholish, mulai dari pemikir aktivis gerakan Islam sampai peneliti asing. Di dalam negeri, pemikiran Nurcholish ditentang tokoh Masyumi, Profesor H.M. Rasjidi. Sedangkan dari negeri Jiran, Malaysia, ia dicerca oleh Muhammad

Kamal Hassan, penulis disertasi yang kemudian diterbitkan dengan judul *Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia*. Hassan menuding Nurcholish sebagai anggota Operasi Khusus (Opsus) di bawah Ali Moertopo.

Kejutan berikut datang lagi pada Pemilu 1977, dalam pertemuan di kantor Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), saat para aktivisnya sedang cenderung memilih Golkar sebagai kendaraan politik. Nurcholish satu-satunya tokoh yang meminta agar mahasiswa tidak memilih Golkar. “Sebab, waktu itu, menurut Cak Nur, Golkar sudah memiliki segalanya, militer, birokrasi, dan uang,” kata Utomo. Maka, dalam kampanye Partai Persatuan Pembangunan (P3), Nurcholish mengemukakan teori “memompa ban kempes”, yaitu pemikiran agar mahasiswa memilih partai saja ketimbang Golkar. Cak Nur percaya pada *check and balances*, mengajak mahasiswa agar tidak memilih Golkar, dan dia tak masuk Golkar. Ada pengaruh atau tidak? Nyatanya, di Jakarta PPP menang. Dengan tema demokrasinya itu, orang menjadi lebih berani, sehingga Golkar di Jakarta terus-terusan kalah.

Pemikiran politik Nurcholish semakin memasuki ranah filsafat setelah ia kuliah di Universitas Chicago, di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, untuk meraih gelar doktor dalam bidang filsafat. Nurcholish terlibat perdebatan segitiga yang seru dengan Amien Rais dan Mohamad Roem. Pemicunya adalah tulisan Amien Rais di majalah *Panji Masyarakat*, “Tidak Ada Negara Islam”, yang menggulirkan kegiatan surat-menyurat

antara Nurcholish yang berada di Amerika dan Roem di Indonesia. Cak Nur menyatakan tidak ada ajaran Islam yang secara qoth'i (jelas) untuk membentuk negara Islam. Surat-surat pribadi itu ternyata tak hanya dibaca Roem, tetapi juga menyebar ke tokoh lain, misalnya Ridwan Saidi.

Di kalangan alumni HMI, Nurcholish sangat berpengaruh. Misalnya, saat Korps Alumni HMI (KAHMI) akhirnya menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan harus menemui Presiden Soeharto di Istana, Nurcholish "diculik" kawan-kawan HMI-nya untuk menghadap Presiden. "Karena ada orang yang berusaha tidak mengikutkannya. Tapi ada yang menyatakan dia harus ikut. Sebab, kalau Cak Nur datang, pertemuan menjadi cukup kuat."⁹

Pertemuan Nurcholish dengan Soeharto terakhir, pada Mei 1998, menunjukkan besarnya pengaruh Cak Nur. Saat itu Nurcholish berbicara langsung kepada Soeharto memintanya mundur.¹⁰

Itulah sebabnya setiap berbicara tentang Islam di Indonesia, nama Cak Nur tak bisa tidak mesti ikut dibicarakan. Cak Nur sendiri tidak hanya sebagai tokoh pemicu pembaharuan pemikiran Islam yang memancing polemik di tingkat elite intelektual Islam, tapi Cak Nur sendiri perlahan tapi pasti telah menjelma menjadi teks atau *discourse* pembaharuan itu sendiri.

⁹ *www. Ensiklopedi Tokoh Indonesia*. All right reserved. Penerbit Pt Asasia Design and Maintenance by Esero. Copy right © 2002-2009.

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama Dan Berbangsa di Masa Transisi*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 108.

B. Demokrasi: Sistem Permainan Politik Yang Terbuka

Sebagai pemikir yang cukup memiliki otoritas, pandangan-pandangan Nurcholish Madjid tidak semata-mata berhubungan dengan persoalan-persoalan keagamaan *an sich*, melainkan wacana politik pun tidak luput dari perhatiannya. Salah satu yang menonjol adalah pemikirannya mengenai demokrasi, yang sebenarnya sudah ia geluti sejak beberapa dasawarsa yang lalu, namun belakangan menarik perhatiannya secara khusus, di samping juga karena meningkatnya perhatian sejumlah kalangan, seiring dinamika politik kontemporer bangsa Indonesia.

Bagi Nurcholish Madjid, demokrasi adalah suatu kategori dinamis. Ia senantiasa bergerak dan berubah, baik itu ke arah negatif maupun positif. Suatu negara cukuplah disebut demokratis manakala didalamnya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah perkembangan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. *Check lists* yang dapat digunakan untuk mengukur maju mundurnya demokrasi adalah seberapa jauh kebebasan azasi seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul itu dapat dilaksanakan. Kebebasan azasi itu selanjutnya dapat dikaitkan dengan berbagai pengalaman di berbagai segi kehidupan, baik dalam dimensi politik, ekonomi maupun hukum.¹¹

Dari sudut pandang ini Cak Nur ingin menyampaikan bahwa di negara demokratis, seharusnya negara membuka lebar-lebar tuntutan yang menjadi aspirasi masyarakat dan pelaksanaan kebebasan azasi dari para warganya,

¹¹ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm.102.

sehingga apa yang dilakukan pemerintah, ketetapan atau pun keputusan yang dihasilkannya di dalam bidang, sosial, ekonomi, politik, hukum, maupun dalam bidang lainnya, pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat untuk didengar aspirasinya sehingga keputusan yang diambil akan membawa dampak yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat dan negara itu sendiri. Dengan kata lain di negara demokrasi, suara atau aspirasi rakyat harus didengar, tidak ada larangan dalam menyampaikan pendapat (kebebasan), tidak ada keseweng-wenangan dalam penegakkan hukum, yang bertujuan untuk keadilan dalam masyarakat..

Lebih jauh Nurcholish Madjid berpendapat, bahwa pilihan kita kepada sistem demokrasi sebagai ideologi, tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil, yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka.¹² Dengan fungsinya ini dimungkinkan bagi setiap orang untuk memberikan masukan-masukannya maupun kritikan-kritikanya untuk membangun demokrasi itu sendiri.

Hal ini juga sesuai dengan sejarah kelahiran, dan penerimaan masyarakat terhadap demokrasi, tuntutan demokratisasi di berbagai wilayah didorong oleh faktor yang antara lain sistem pemerintahan yang menganut sistem politik sentralistik, otoriter, diktator atau monarki seperti Timur Tengah, sistem yang ada cenderung lebih represif, tidak memberi ruang gerak bagi masyarakat dan korup.

¹² Nurcholish Madjid, "Cita-Cita Politik ..., *ibid*, hlm.112.

Oleh karena itu, menurut Nurcholish Madjid, bagi rakyat Indonesia. Lambat atau cepat tidak ada pilihan lain kecuali menuju dan mengembangkan demokrasi yang lebih maju (*advance democracy*) sebagai kelanjutan logis keberhasilan pembangunan.

Namun dalam tulisannya di majalah *Tempo*, September 1991, Madjid mengikatkan bahwa demokrasi bukanlah semata-mata jargon politik, tapi juga lebih penting lagi adalah soal contoh dan keteladanan. Untuk itu, ia mengingatkan agar para penganjur demokrasi, tak terkecuali para pemimpin dan tokoh Islam, bisa memberi contoh dan berperilaku sebagai demokrat sejati.¹³ Yang menarik disini ialah, Nurcholish dalam kolomnya di *Tempo* itu mengutip pandangan Ibn Taimiyah mengenai keadilan sebagai *ideatum* Islam tentang kekuasaan dan negara yang mengatakan, “*Tuhan mendukung kekuasaan yang adil meskipun kafir, dan tidak mendukung kekuasaan yang zalim meskipun Islam.*”

Pada saat ini memang istilah demokrasi telah diterima oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia, bahkan pemerintah otoriter sekalipun menggunakan istilah demokrasi, untuk mengkarakterisasikan aspirasi mereka. Akibatnya adalah menjamurnya pengertian demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi sosialis dan sebagainya. hal ini juga yang terjadi di Indonesia, demokrasi hanya di jadikan jargon-jargon politik, slogan-slogan kosong tanpa makna yang berarti, dan

¹³ <http://www.tempo.co.id/ang/min/01/27/proklamasi1.htm>

jauh dari substansi demokrasi itu sendiri, tidak adaniatan untuk menuju demokrasi yang sepenuhnya.

Hal ini tampaknya kritikan Cak Nur pada sistem demokrasi yang diterapkan di negara kita, mulai dari Presiden Soekarno yang berusaha mewujudkan Demokrasi Parlementer yang mengalami jatuh bangun, kemudian muncullah Demokrasi terpimpin, yang menjadikan Soekarno sebagai orang yang paling kuat. Menjadi penguasa tertinggi dan penguasa tunggal. Partai politik dikebiri dan tidak ada pemilu. Begitu juga dengan Presiden Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya, yang bersikap otoriter dan sentralistik. Hal ini yang menjadi sangat ironi di negara yang mayoritas berpenduduk Islam yang dipimpin oleh seorang yang beragama Islam, mengapa hal demikian yang terjadi.

Dari sini juga dapat dilihat bahwa pandangan Nurcholis terhadap pemimpin atau pemerintahan itu tidak mempermasalahkan siapa yang memimpin, agamanya apa, Islam atau non Islam, atau yang lainnya, tetapi sejauhmana pemerintahan itu berpihak kepada rakyatnya. Selama pemerintahan itu berpihak kepada rakyat maka kita wajib mendukung dan membelanya dan pada saat pemerintahan itu tidak berpihak kepada rakyat maka kita wajib menentang dan melawan pemerintahan tersebut.

Karena walau bagaimanapun dalam negara demokrasi rakyat adalah yang berdaulat. Dalam pepatah Latin, dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi Vox Dei*). Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapa pun, sehingga kehendak rakyat

seakan-akan kehendak Tuhan. Di samping itu, ada juga pepatah yang mengatakan kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi (*Salus Populi Supreme Lex*). Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat.¹⁴

Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum muslim pandangan etika azasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam sosial politik. Atas dasar etika itu, seseorang muslim memilih suatu pandangan sosial politik tertentu yang dianggapnya paling menopang usaha mewujudkan cita-citanya, yaitu kebaikan bagi semua.

Demokrasi itu sendiri, menurut Nurcholish Madjid, adalah suatu konsep yang hampir-hampir mustahil dita'rifkan. Cukuplah dikatakan bahwa demokrasi adalah suatu sinonim dari apa yang disebut *polyarcy*. Demokrasi dalam pengertian itu bukanlah sistem pemerintahan yang mencakup keseluruhan cita-cita demokrasi, tetapi yang mendekatinya sampai batas-batas yang pantas.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu sendiri perlu terus diperjuangkan dan jangan sampai pernah berhenti, seperti apa yang sudah disampaikan diatas bahwa demokrasi adalah suatu kategori dinamis yang terus bergerak dan berubah sesuai dengan aspirasi rakyat.

Dalam hal ini suatu negara berkembang di dunia ketiga dapat dikatakan negara yang demokratis, manakala di dalam sistem pemerintahan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat diterapkan dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan, yaitu persamaan

¹⁴ M. Amien Rais, "Masalah-masalah yang Dihadapi Bangsa Indonesia", dalam *Millennium: Jurnal Agama dan Tamaddun*, Nomor I Tahun 1, Januari-April 1998, hlm. 7.

¹⁵ Nurcholish Madjid, "Suatu tatapan...", *op. cit.*, hlm.11.

kedudukan di muka hukum, walaupun tidak secara komprehensif dapat dilaksanakan, namun sudah mendekati kriteria sebuah negara demokrasi.

Analisis Nurcholish tentang seluk beluk demokrasi banyak berlandaskan pada teks al-Qur'an, misalnya tentang kebebasan dan tanggung jawab individual, Madjid menyandarkan pada QS. Al-An'am [6]:94. tentang kebebasan bereksperimen, Madjid merujuk pada QS, al-Kahfi [18]: 29, tentang kebebasan beragama, Madjid merujuk pada QS. Yunus [10]: 99, tentang sikap kebijaksanaan, Madjid menyandarkan pada QS. al-Nahl [16]:25, tentang keadilan, Madjid menyandarkan pada QS. an-Nisa [4]: 135, dan tentang musyawarah, Madjid merujuk pada QS. asy-Syura [42]:38. Nilai-nilai fundamental ini menjadi pesan mendasar dalam kitab suci yang menuntut kaum muslim mampu mengoperasionalkannya.

Bahkan Nurcholish sampai berkesimpulan bahwa Islam sepanjang ajaran agamanya, tidaklah menghendaki melainkan kebaikan bersama. Ukuran kebaikan itu ialah kemanusiaan umum sejagad dan meliputi pula sesama makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas. Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum muslim pandangan etika azasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam sosial politik. Atas dasar etika itu, seseorang muslim memilih suatu pandangan sosial politik tertentu yang dianggapnya paling menopang usaha mewujudkan cita-citanya, yaitu kebaikan bagi semua.¹⁶ Oleh karena itu pilihan kita kepada sistem demokrasi sebagai ideologi, tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan

¹⁶ Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita ...", *op. cit.*, hlm.52.

prinsipil, yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka.

Jadi, Cak Nur menyatakan nilai-nilai fundamental dari pesan agama yang ada dalam teks kitab suci al-Qur'an menuntut kaum muslim untuk dapat mampu menyinergikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan tersebut demi kebaikan bersama. Parameter itu ialah kemanusiaan umum sejadad dan meliputi pula sesama makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas. Karena pada dasarnya misi yang diemban demokrasi searah dengan agama (Islam), yaitu terdapat titik temu diantara keduanya, ialah jaminan berlangsungnya *checks and balances* antara mereka yang sedang berkuasa dan mereka yang sedang tidak berkuasa (pemerintah dan rakyat); Jaminan kebebasan asasi, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, dan kebebasan dari rasa takut; dalam sistem politik yang demokratis berlaku prinsip *the people control the leaders*, lawan dari *the leaders control the mass* yang menjadi prinsip otorianisme; dan kesediaan membagi kekuasaan dengan pihak lain agar tercapai keseimbangan harmonis antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa sistem politik demokrasi itu dapat berjalan searah dengan misi agama. Ia bahkan dapat disebut yang paling baik dan paling tepat, karena dengan mekanismenya yang wajar ia bisa menghindarkan adanya tirani mayoritas atas

minoritas dan juga tirani minoritas atas mayoritas, yang keduanya sama-sama berbahaya. Dengan demikian, kekuatan demokrasi terletak pada :

1. Jaminan berlangsungnya *checks and balances* antara mereka yang sedang berkuasa dan mereka yang sedang tidak berkuasa (pemerintah dan rakyat).
2. Jaminan kebebasan asasi, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, dan kebebasan dari rasa takut.
3. Dalam sistem politik yang demokratis berlaku prinsip *the people control the leaders* , lawan dari *the leaders control the mass* yang menjadi prinsip otoritarianisme; dan

Dalam alam demokrasi ada kesediaan *shering of power* atau kesediaan membagi kekuasaan dengan pihak lain agar tercapai keseimbangan harmonis antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.¹⁷

Ringkasnya, bagi Nurcholish terdapat banyak titik temu antara agama dengan demokrasi khususnya bila dikaitkan dengan tujuan keduanya, yaitu cita-cita untuk kebaikan semua. Maka tidak heran jika penerimaan umat Islam terhadap demokrasi sangat alami.

Berikut dengan ramainya konseptualisasi gagasan tentang demokrasi dan bagaimana usaha untuk mewujudkannya, Nurcholish Madjid mengemukakan gagasannya sebagai berikut :

“Demokrasi adalah suatu kategori dinamis bukan statis. Tidak seperti kategori-kategori statis yang stasioner (diam di suatu tempat), suatu kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus bergerak, baik

¹⁷ Kesimpulan teori demokrasi itu dikutip dari A. Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia : gagasan sentral Nurcholish Madjid dan abdurrahman Wahid*, Jakarta : Rineke Cipta, 1999, hlm. 67-68.

secara negatif (mundur) atau positif (maju). Dalam masalah sosial, suatu nilai yang berkategori dinamis seperti demokrasi dan keadilan, gerak itu juga mengimplikasikan perubahan dan perkembangan. Karena adanya sifat gerak itu, maka demokrasi dan keadilan tidak dapat didefinisikan sekali untuk selamanya (*once and for all*). Karena itu, ‘demokrasi’ adalah sama dengan proses ‘demokratisasi’ terus menerus. Cukuplah dikatakan suatu masyarakat tidak demokratis kalau ia berhenti berproses kepada yang lebih baik, dan terus yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, faktor eksperimentasi dengan ‘coba’ dan ‘salahnya’ (*trial and error*) adalah bagian yang integral dari ide tentang demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika ia membuka kemungkinan eksperimentasi terus menerus dalam kerangka dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan sekali untuk selamanya, sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan, adalah sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran”.¹⁸

Tentunya proses berkembang tersebut banyak kendala dan hambatan. Kesalahan-kesalahan yang sudah dilewatinya membuat semakin mengerti apa kelemahan dari sistem atau birokrasi di negeri ini sebagai cerminan di masa yang akan datang. Pastilah hal ini bergerak dinamis, bukan statis. Karena mengikuti perkembangan pasar, globalisasi dan perekonomian di suatu bangsa. Dengan demikian, demokrasi yang sudah berjalan atau masih berjalan ini sedang menuju kepada kesempurnaan yang ditopang dengan penguatan *civil society* (masyarakat madani) dan penciptaan *good governance and clean governance*.

Menurut Nurcholish, demokrasi menganut pandangan dasar kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat dijamin kebebasannya. Dalam hubungan ini, tujuan kebaikan bersama tetap primer, sehingga kesepakatan merupakan kata kunci. Demokrasi hidup dalam kesepakatan dan ia akan tetap

¹⁸ Nurcholish Madjid, “Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal sebagai Pangkal Demokrasi, Hak Azasi dan Keadilan”, dalam Elza Peldi Ther (ad.), *Demokrasi Politik Budaya dan Ekonomi*, Jakarta : Paramadina, 1994, hlm. 134-138.

kuat bertahan selama tersedia banyak jalan untuk mencapai kesepakatan. diakui bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, sehingga bagi Nurcholish, tumbuhnya sistem yang menganut oposisi dipandang merupakan suatu kewajaran. Dalam hal ini, yaitu oposisi yang dilakukan demi tercapainya cita-cita bersama. Oposisi ini diperlukan karena untuk mempertajam pikiran.¹⁹

Apa yang menjadi pandangan Nurcholish tidak berbeda dengan apa yang diungkapkan Huwaydi yang menjadi alasannya menerima demokrasi dalam poin kelima dan keenam, yaitu, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Ada banyak cerita yang memperlihatkan hal itu; seperti dirumuskan oleh teoritis-teoritis politik Islam. Semisal al-Mawardi, *imamah* (kepemimpinan politik) adalah kontrak sosial yang riil, yang karenanya, kata Ibn Hazm, jika seorang penguasa tidak mau menerima teguran boleh diturunkan dari kekuasaannya dan diganti dengan yang lain.

Dan juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang diungkapkan oleh Henry B. Mayo pada poin keempat, yaitu Nilai keanekaragaman. Demokrasi dalam hal ini melihat keanekaragaman bukan saja sebagai sesuatu yang ada dan sah, tetapi sebagai sesuatu yang baik sebagaimana kebebasan. Untuk itu diperlukan masyarakat yang terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satu nilai pun yang dapat benar-benar ditarik sampai pada batas yang mutlak. Dalam masyarakat demikian, karena posisinya sama, kesempatan untuk

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam...*, *op. cit.*, hlm. 225.

prakarsa dan pengembangan bakat paling tidak kondisi yang memungkinkan diberikan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, menurut Nurcholish Madjid, modal utama untuk mewujudkan demokrasi adalah Pancasila. Dasar negara itu, setidaknya telah memenuhi prasyarat asasi untuk mewujudkan demokrasi atau tatanan politik yang membawa kebaikan bersama. Prasyarat asasi itu ialah: *Pertama*, adanya orientasi hidup transendental. *Kedua*, ikatan batin pada nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, kesadaran akan tanggung jawab bersama (tidak menyerahkan atau mempertaruhkan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat semata-mata pada kemauan seorang tokoh, betapa pun iktikad baiknya, tetapi pada mekanisme pengawasan umum dalam tatanan sosial politik yang partisipatif). *Keempat*, pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Dan *kelima*, ditengah antara yang empat itu, prasarana dan wadah persatuan dan kesatuan negara bangsa.²⁰

Modal utama ini, seharusnya sudah bisa membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis, karena Indonesia memiliki prasyarat-prasarat itu, dan itu yang seharusnya diterapkan di Indonesia, dan juga yang membedakan demokrasi di Indonesia dengan model demokrasi di negara lain, dan ini juga menunjukkan bahwa Nurcholis Madjid tidak menerima demokrasi apa adanya sesuai yang dirumuskan oleh Barat, tetapi bertitik tolak dari jiwa keimanan

²⁰ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 103-105.

dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dasar yang benar dari seluruh kegiatan manusia; yaitu adanya orientasi hidup transendental.

Dengan melihat lima prasyarat asasi di atas, maka demokratisasi yang sudah berjalan sebenarnya mengalami perkembangan dan perubahan secara terus-menerus, karena berjalan dengan seiringnya dinamika pergolakan bangsa dan sistem perpolitikan di Indonesia. Apalagi di era pasar bebas yang penuh dengan tantangan dan kompetitif yang alot membuat demokrasi di negeri ini semakin bergerak ke arah yang lebih sempurna. Di mulai dari bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, pertahanan keamanan, HAM, dan lain sebagainya yang berdampak langsung kepada demokratisasi bangsa.

Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, menurut Nurcholish Madjid paling tidak ada tujuh catatan penting pandangan hidup demokratis, yang sebelumnya dilakukan penelitian olehnya di berbagai Negara yang demokrasinya cukup mapan:²¹

Pertama, pentingnya kesadaran kemajemukan. Kesadaran kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Masyarakat yang teguh berpegang pada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya juga dengan teguh pula memelihara pandangan hidup demokratis seperti ini menuntut moral pribadi yang tinggi.

Kedua, dalam peristilahan politik dikenal dengan “musyawarah”. Keinsafan akan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau

²¹ *Ibid.*, hlm. 105.

mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan “kalah suara”.

Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya “*partial functioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip itu ialah kesediaan untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu kompromi atau *ishlah*. Korelasinya yang lain ialah seberapa jauh kita dewasa dalam mengemukakan pendapat yang lebih baik.

Berkenaan dengan ini, menurut pemakalah salah satu tantangan nyata bagi kita bangsa Indonesia ialah situasi kejiwaan atau *mindset* yang masih menggunakan prinsip-prinsip yang diterapkan pada masa orde baru. Sehingga memunculkan stigma dalam masyarakat bahwa tertutupnya kran demokrasi di tanah air yang berakibat apatisisme terhadap pemerintahan saat ini. Berbagai kebijakan pemimpin yang tidak pro rakyat, sangat lambat dan ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan, belum lagi upaya-upaya untuk mengentaskan dari belenggu kemiskinan dan minimnya ilmu pengetahuan karena tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi masih jauh dari ekspektasi masyarakat.

Ketiga, ungkapan menghalalkan segala cara menginsyarkan suatu kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral. Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan.

Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.

Keempat, permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang jujur dan sehat pula. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang jujur dan sehat pula. Permufakatan yang dicapai melalui “engineering”, manipulasi atau taktik yang sesungguhnya hasil sebuah konspirasi bukan saja merupakan permufakatan yang curang, atau yang lainnya, malah dapat disebut sebagai pengkhianatan pada nilai dan semangat demokratis. Karena itu faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua merupakan hal yang sangat vital.

Kelima, terpenuhinya kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Dan karena ketiga hal itu menyangkut masalah sosial dan budaya, maka pemenuhan segi-segi ekonomi itu tidak lepas dari perencanaan sosial budaya. Warga demokratis ditantang untuk mampu menganut hidup dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokratis yang *check list*-nya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal namun dengan memperhatikan kenyataan kenisbian kultural.

Keenam, kerjasama antara warga masyarakat dan sikap saling mempercayai iktikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan

kemasyarakatan yang ada merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.

Ketujuh, urgensi pendidikan demokrasi masih sebatas pada usaha indoktrinasi dan penyuaian konsep-konsep secara verbalistik. Karena pandangan hidup demokrasi modern terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, mana nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita, tidak dalam artian menjadikannya muatan kurikuler yang *klise*, tetapi dengan jalan diwujudkan dalam hidup yang nyata (*lived in*) dalam sistem pendidikan kita.

Jadi, demokrasi dalam pandangan Cak Nur juga memandang bahwa kemanusiaan dan perbedaan pendapat sangatlah dijunjung tinggi di negara Indonesia untuk mempererat persatuan bangsa. Sebab tanpa adanya sebuah perbedaan pendapat, semua orang akan beranggapan bahwa hanya ada satu argumen yang dapat dibenarkan mengenai sesuatu hal. Apakah ini dapat bertahan di negara yang menjunjung tinggi demokrasi? Tentunya tidak. Karena di negara-negara demokratis, termasuk Indonesia sangatlah kompleks / beragam ras, etnis, golongan, dan lain sebagainya. Padahal, demokrasi pada dasarnya dari, oleh dan untuk rakyat.

Ketujuh catatan Nurcholish ini penting untuk bisa diterapkan di Indonesia, jika Indonesia pingin benar-benar menjalankan demokrasi, tidak hanya sekedar bualan yang jauh dari substansi demokrasi, dan demokrasi juga harus dijalankan sesuai dengan norma dan aturan yang tidak bertentangan

dengan etika dan moral agama, sehingga demokrasi berjalan sesuai apa yang diharapkan dan membawa kebaikan bagi semua.

C. **Partisipasi Masyarakat : Kedaulatan di Tangan Rakyat**

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan Indonesia menuju demokrasi. Tanpa partisipasi, demokrasi sangat mustahil akan menjadi kenyataan. Partisipasi (sosial politik), menurut Nurcholish Madjid, sesungguhnya cukup problematik. Disini Nurcholish mencontohkan, negara Amerika, negara yang paling maju, seperti apa yang dikatakan Robert Dahl, rendahnya partisipasi politik di New Haven, Connecticut, bukanlah hal luar biasa, melainkan kenyataan umum di Amerika yang sangat memperhatikan. Dahl mengatakan yang menjadi pusat perhatian rakyat kebanyakan ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut makanan, seks, percintaan, keluarga, pekerjaan, kesenangan, kenyamanan, persahabatan dan sebagainya. Dan hanya sedikit dari mereka yang menunjukkan minat kepada politik.²²

Apa yang disampaikan ini menjadi bentuk perhatian tersendiri bagi bangsa kita, yang masih dalam kategori negara berkembang, taraf hidup yang rendah, pendidikan kurang memadai. Oleh karena itu partisipasi ini harus ditumbuh kembangkan baik oleh warga negara maupun oleh pemerintah, karena tanpa adanya partisipasi, proses demokratisasi tidak akan berjalan dengan lancar dan terarah dengan baik.

²² ²² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-6, 2008, hlm. 551-552.

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi warga negara dalam politik dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, sikap dan kepercayaan atau penilaian warga negara terhadap pemerintah. Namun, kedua faktor ini tidak berdiri sendiri. Bisa jadi, kedua faktor tinggi rendahnya partisipasi politik warga negara ini juga dipengaruhi oleh faktor lain yang mengitari. Misalnya status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Fenomena rendahnya partisipasi itu tampaknya perlu diketahui sebagai peringatan agar Indonesia tidak mempunyai bayangan dan angan-angan yang kurang realistis mengenai kemungkinan bentuk dan tingkat partisipasi dalam politik di Indonesia di masa mendatang.

Sebagai bentuk partisipasi politik di negara bangsa ialah peran serta masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah maupun pusat, pemilihan legislatif dan presiden. Dengan menggunakan hak pilih tersebut, maka masyarakat dapat menilai bahwa figur yang nantinya akan membawa perubahan di daerah atau bangsanya benar-benar terwujudkan dan obsesi itulah yang akan membawa masyarakat ke arah progresif, tidak instan dan penuh optimis bahwa perubahan akan datang di kemudian hari.

Di negara-negara demokratis, termasuk Indonesia inti pemikiran dari konsep partisipasi (sosial politik) dalam kehidupan bernegara adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan adanya kesempatan melakukan partisipasi secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan, seperti diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam

partisipasi mengandung makna kebebasan dan kemerdekaan sebagai hak-hak yang sangat asasi bagi setiap pribadi manusia.

Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat, ungkap Cak Nur, adalah hak dan kewajiban manusia melalui masing-masing pribadi anggota masyarakatnya, untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di dalam bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, partisipasi masyarakat dapat mengantarkan kepada perwujudan seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan, sebagaimana dinyatakan di dalam nilai-nilai kesepakatan luhur dalam Mukaddimah UUD 1945.²³

Dengan alasan yang sama, Huwaydi dan kang Jalal menerima demokrasi, bahkan demokrasi yang semacam ini cocok dengan Islam, dan umat Islam harus menjalankan demokrasi, dalam kehidupan bernegara.

Jika hal itu diabaikan oleh masyarakat, maka hemat penulis bangsa Indonesia akan mengalami *broken of social control* atau jurang pemisah rakyat sebagai pengawas dari pemerintah dan juga *individually of work* atau bekerja dengan sendiri-sendiri (tidak kolektif) yang berdampak kepada apatisme masyarakat terhadap pemerintah. Jika apatisme muncul, maka harapan kecil pemerintah untuk membawa rakyatnya menuju kesejahteraan sosial dan partisipasi dalam berpolitik.

²³ Nurcholish Madjid, *Fatsoen Nurcholish Madjid*, Jakarta: Republika, 2002, hlm. 191.

Lebih lanjut, Nurcholish menegaskan bahwa partisipasi itu sendiri merupakan kelanjutan wajar dari hak setiap individu untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya serta perbuatannya di dalam segala bidang kehidupan secara umum, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keagamaan serta politik. Setiap pilihan dan perbuatan seseorang itu dapat dipastikan tidak akan luput dari permintaan pertanggungjawaban. Semua pilihan dan perbuatan setiap individu itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa.²⁴ Dan dalam uraiannya ini, tampaknya partisipasi harus dijalankan oleh setiap individu untuk menentukan pilihan jalan hidupnya dan perbuatannya didalam bidang apaun, tidak hanya menekankan pada pilihan dan perbuatan dalam bidang politik, tetapi juga semua bidang kehidupan yang dilakukannya di bumi ini. Dan atas pilihannya itu juga kelak manusia harus mempertanggung jawabkannya dihari ahir.

Dalam sejarah Islam, praktik partisipasi (sosial-politik) bukan hal yang baru, seperti diungkapkan oleh Cak Nur mengutip Bellah, masyarakat Islam paling awal dikategorikan sebagai masyarakat modern. Seperti disebutkan Bellah karena tingkat partisipasi politik masyarakat yang terbuka dan tinggi. Pada saat itu, seorang elite politik atau pemimpin masyarakat diangkat berdasarkan hasil pemilihan apapun bentuk teknis pemilihan saat itu.²⁵

Disini Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya mengaku sebagai orang Islam seharusnya bisa mencontoh umat dimasa Nabi Muhammad ini, karena dalam sepanjang sejarah pemerintahan Islam,

²⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: membangun tradisi dan visi bari Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1990, hlm. 1999.

²⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hlm. 553.

pemerintahan dimasa Nabi adalah pemerintahan yang paling ideal. Sekarang penulis melihat dari kaca mata iklim sosiologi politik di Indonesia, yang memang sudah ditanamkan bagaimana berdemokrasi yang baik dan benar, termasuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan seorang pemimpin. Bahkan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat mencontohkan dalam setiap pidato kenegaraan dan di negara lain, Indonesia menjadi bahan rujukan (teladan) dalam hal berdemokrasi. Terlepas dari kehidupan nyata pesta demokrasi yang sudah puluhan tahun diselenggarakan penuh dengan tambal sulam. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan suasana demokrasi yang benar-benar bervisi kerakyatan.

Dikatakan di awal bahwa hak setiap individu untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya serta perbuatannya di dalam segala bidang kehidupan secara umum, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keagamaan serta politik merupakan suatu kewajiban yang tak terbantahkan di masyarakat belahan dunia sekalipun, termasuk Indonesia. Karena kehidupan yang berjalan mengarah kepada kemajuan selalu tertanam cita-cita politik negara di setiap manifestasinya yang mutlak menjadi harapan masyarakat Indonesia (*Indonesia of peoples expectation*).

Seperti yang dikutip Nurcholish, Thaha Husein, sastrawan Mesir dalam karyanya Al-Syaykhani menyebutkan bahwa contoh teladan partisipasi politik yang dilakukan pada khalifah pasca Nabi Muhammad, khususnya perilaku politik Abu Bakar dan Umar, merupakan replika dari apa yang diteladankan oleh Sunnah Nabi. Uswah hasanah partisipasi politik Rasulullah

itu tentu saja merujuk kepada al-Qur'an, yang menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah wujud lain dari ajaran Islam tentang musyawarah atau syura.²⁶ Melalui musyawarah atau syura, Nabi SAW sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar sistem politik yang terbuka, yang memberikan keleluasan bagi adanya partisipasi politik masyarakat kaum beriman. Musyawarah atau syura, bagi Nurcholish, biasanya dijalankan dengan adanya asumsi kebebasan pada masing-masing perorangan manusia. Musyawarah atau syura, sebagaimana diteladankan oleh Nabi SAW itu mengandung partisipasi yang egaliter dari semua anggota masyarakat.

Kemudian setiap pengekangan kebebasan asasi manusia, pencekalan atau pelarangan untuk memilih partai politik yang dikehendaknya dalam pemilu, dan pemasangan partisipasi sosial-politik masyarakat adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap demokrasi. Dalam konteks inilah Nurcholish Madjid merasa relevan untuk membicarakan tentang perlunya partai oposisi. Sejak awal 1990-an, ia melontarkan gagasan partai oposisi itu, walaupun ia mengakui bahwa gagasan tersebut bukan orisinal dari dirinya. Bagi Nurcholish, oposisi adalah salah satu bentuk partisipasi sosial-politik masyarakat.²⁷

Sekarang melihat konteks kekinian, dalam pemilu legislatif yang sudah diselenggarakan dan disaksikan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia adalah potret demokrasi Indonesia yang di tahun-tahun sebelumnya sudah beberapa kali melaksanakannya. Bermunculan partai-partai baru kontestan pemilu

²⁶ *Ibid.*, hlm. 154.

²⁷ Nurcholis Madjid, *Membangun Oposisi, Menjaga Momentum Demokratisasi*, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2000, hlm. 34.

legislatif dan presiden bulan depan nanti (Juli 2009) merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat dan terbukanya lebar-lebar kebebasan berpendapat dan otokritik yang ditujukan kepada pemerintah. Era digitalisasi yang sudah menjamur di negeri ini mempengaruhi pula kehidupan demokrasi di segala lini kehidupan masyarakat, yang di awal Cak Nur mengatakannya berkembang dinamis, menuju ke arah yang lebih sempurna dengan berbagai problematika yang semakin kompleks dihadapinya untuk memecahkan bersama (*problem solving*). Dari sinilah demokrasi dapat di ukur seberapa jauh mengalami metamorfosa dan masyarakat pun perlu belajar berdemokrasi, walaupun sudah dijadikan teladan bagi pelaksanaan demokrasi di negara-negara lain. Masalah demi masalah yang kompleks ini diselesaikan secara kolektif dan arif akan menjadikan masyarakat lebih dewasa untuk berdemokrasi.

Di dalam sistem demokrasi, jelas Nurcholish sangat memerlukan *check* atau pengawasan. Sebab demokrasi merupakan sistem yang terbuka untuk semua pemeran serta (partisipan) dan tidak dibenarkan sama sekali diserahkan kepada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya. Dan *balance* atau pengimbangan juga sangat diperlukan dalam demokrasi. Sebab, sistem masyarakat dapat dikatakan demokratis hanya bila terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, apapun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan. Mekanisme *check and balance* inilah yang membuat demokrasi,

seperti dikutip Nurcholish dari Alexis de Tocqueville, tidak menjadi “tirani mayoritas”.²⁸

Partisipasi disini selain sebagai pengawasan dan pengimbangan terhadap pemerintah juga berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah, agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat, karena dengan kontrol ini diharapkan pemerintah tetap berada pada jalan yang benar. Seperti apa yang dikatakan Jalaludin Rahmat di atas, Islam seperti termaktub dalam al-Qur’an dan Sunnah menganjurkan orang untuk berani mengatakan yang benar. Nabi Muhammad saw. Mengatakan kebenaran di depan penguasa yang dhalim, Islam melarang rakyat menanti penguasa yang dzalim. Kontrol terhadap penguasa bahkan merupakan salah satu sendi ajaran Islam yang lazimnya disebut sebagai amar ma’ruf nahi munkar.

Partisipasi dalam arti kedaulatan rakyat dan negara berhadapan dengan tekanan dunia luar pernah berada dalam jurang kehancuran yang paling dalam, keterpurukan kedaulatan rakyat itu sangat dirasakan kerugiannya oleh rakyat Indonesia sendiri. Padahal, mereka adalah pendiri, pembentuk, dan pemimpin negara yang sebenarnya. Pengalaman buruk yang menimpa kedaulatan rakyat ini seharusnya dapat dipetik hikmahnya, agar tidak mengulang kembali di masa-masa mendatang bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sekali kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam partisipasi dikhianati, maka sekali itu juga, demokrasi menjadi tirani. Jangan sampai sejarah Soekarno dan Soeharto terulang lagi di negeri tercinta ini.

²⁸ Nurcholis Madjid, *Cendikiawan*, hlm. 128.